

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 2 DESEMBER 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan
Ekonomi Politik

Faisal Fadilla Noorikhsan, Hendra Gunawan 133-154

Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu
Kota Negara Baru Indonesia

Budiman, E Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus,
Hendra Saputra 155-174

Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Aceh Jaya

Cut Asmaul Husna, Ikhsan, Yeni Sri Lestari, Vellayati Hajad 175-191

Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur
Indonesia

Jauchar B, Budiman, E Letizia Dyastari, Arini Hidayati 192-212

Inovasi Pemerintah Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan
Smart City Di Kabupaten Kendal

Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza 213-230

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar

Aswar Annas, Humaidid Muhajir 231-251

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah 252-269

Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi
Islamic Center Kabupaten Batang

Muhammad Fatchuriza, Maulida Putri Rahmawati 270-284



Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia

Budiman¹, E. Letizia Dyastari², Rita Kala Linggi³, Anwar Alaydrus⁴, Hendra Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mulawarman, Indonesia

InfoArtikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 04-08-2022

Disetujui: 13-09-2022

Dipublikasikan :

18-12-2022

Kata Kunci :

Wacana Politik;

Ekologi; Pembangunan

Berkelanjutan;

Forestcity IKN

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sebuah upaya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa datang melalui kajian perspektif komunikasi politik. Komunikasi Politik diperukan dalam upaya membangun sebuah komunikasi kepada seluruh stakeholders untuk mengathui tantangan pembangunan IKN di masa datang. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah gambaran langkah strategis agar pembangunan IKN berlangsung secara optimal yaitu melalui strategi komunikasi politik adapun yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan ikn, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan optimal dan menuju kota berkelanjutan. Artinya, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat persoalan tersebut maka diperlukan sebuah konsep kominkasi poitik sebagai upaya menghadapi tantangan pembangunan IKN dimasa datang.

Ecological Political Discourse Framing: Sustainable Development Of The New Country Capital, Indonesia

Abstract

This study seeks to examine the issue of ecological political discourse in sustainable development in the State Capital (IKN), East Kalimantan. This research data uses a literature review study sourced from credible reports, news, and journals to be analyzed. The findings of this study indicate that the development of the nation's capital city carries a sustainable forest city model. However, on the one hand, NGOs consider that the development carried out tends to be political and there is an element of an anomalous discourse that sees the national capital area surrounded by coal mining pits. The development was assessed by NGOs as a trick by the government to fill the space of the private sector which was unable to carry out post-mining reclamation and rehabilitation. So the government tries to be present to fill the void through the development of IKN. The authors' findings conclude the ecological development of the nation's capital, it is only an ecological discourse that tends to be utopian and full of budgetary political interests in the sense of spending a large budget using the state budget to meet the needs of political patrons (private and government). So the author provides a recommendation in this case that ecologically sustainable development can only be carried out if the economic, social, and ecological aspects can find common ground and can create national collective awareness about sustainable development as well as create a policy mechanism that adheres to the consensus of sustainability and natural balance.

*Alamat Korespondensi:

budiman@fisip.unmul.ac.id

PENDAHULUAN

Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah dikemukakan resmi pada 26 Agustus 2019. Beberapa simpul alasan utama kenapa ibu kota perlu dipindahkan, dan kenapa ke Kalimantan Timur, telah diobral. Mulai dari tidak memadainya syarat kelayakan kota Jakarta sebagai situs kantor-kantor pusat pengurus negara, soal udara bersih, air bersih, transportasi, dan kepadatan penduduk, besarnya risiko bencana untuk Jakarta dibandingkan dengan Kalimantan Timur, pentingnya memiliki ibu kota negara yang berada di tengah wilayah kepulauan, hingga pengaruhnya untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan keluar dari Jawa menuju Kalimantan. Kalimantan dipilih karena memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di wilayah sensitif.

Konsep pengembangan kota-kota di dunia kini mulai menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti Sustainable City, Green City dan Eco city untuk mengatasi permasalahan perkotaan maupun mencegah berbagai dampak lingkungan. Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyongsong kota yang berkelanjutan dengan salah satu slogan wacananya adalah Forest city. Lantas, bagaimana konsep keberlanjutan dikaitkan dengan kota? Keberlanjutan sendiri bukanlah konsep yang baru muncul karena ternyata ia telah dipopulerkan sejak abad ke-19 meskipun bukan merupakan isu yang muncul ketika terjadi ekspansi yang lebih berkembang pada masa selanjutnya. Perhatian kemudian terfokus pada kondisi kota-kota yang tidak berkelanjutan dan masalah-masalah yang disebabkan oleh perpindahan penduduk yang sangat masif ke kota. Isu-isu inilah yang memotivasi para perencana pembangunan, geographer, dan pemerintah untuk mencari jalan keluar atas permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui pembangunan berkelanjutan (Hassan & Lee, 2014).

Pembangunan berkelanjutan, sebagai sebuah konsep merupakan hasil pemikiran para sarjana Barat yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai wacana. Konsep ini kemudian menjadi “krusial dan mendesak” karena menghubungkan antara kondisi yang dirasakan saat ini dengan masa depan, di mana generasi mendatang

memiliki hak untuk menikmati sumber daya yang dirasakan semakin menipis. Oleh karena itu, muncullah pemikiran untuk menyeimbangkan kemajuan di bidang ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek sosial masyarakat. Konsep perencanaan kota yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan di beberapa kota di dunia, terutama kota-kota di Cina. Begitu pula di Indonesia, Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) dengan menggunakan konsep Forest City. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan, bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) akan diawali dengan merehabilitasi hutan yang ada di sekitar kawasan. Jokowi mengatakan dalam berita Kompas bahwa konsep IKN ini adalah Kota Hutan. Hutan akan dibiarkan hijau seperti ini. Tapi ini yang ada di IKN adalah hutan tanaman industri yang monokultur, homogen tanamannya, setiap tujuh tahun ditebang (Laksono, 2022).

Berdasarkan hal tersebut maka Walhi melihat, isu wacana forest city yang dibawa pemerintah dalam hal pembangunan IKN menunjukkan adanya pengambilan keputusan mega proyek IKN senilai Rp 466 triliun berpotensi untuk menjadi tidak lebih dari pemutihan dosa perusahaan dan penguasa lahan di atas 180 ribu hektar kawasan tersebut (Sukmana, 2019). Dana itu belum termasuk permohonan anggaran dari TNI sebesar Rp 118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI (Simanjuntak, 2019). Keputusan ini juga tampak sebagai operasi mega proyek bagi-bagi konsesi untuk pebisnis dan konsesi untuk oligarki pascapilpres. Sebagai sebuah pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah 'pengabaian total' terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang berlapis dan makin berlipatganda.

Pembangunan IKN di khawatirkan merupakan sebuah desain mega proyek korupsi dan kolusi melalui bagi-bagi konsesi. Jika begini, benarkah kepentingan perlunya ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik? Isu ibu kota baru terlanjur ramai, di atas basis yang belum kuat. Perangkat undang-undangnya belum ada, filosofi konsep kotanya masih dipikirkan (CNNIndonesia, 2019). Dari pengalaman berbagai perpindahan ibu kota di dunia ternyata butuh lebih dari satu dekade untuk persiapan mega proyek seperti ini, serta butuh kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil untuk menyokong pembiayaannya. Sebuah kemewahan yang belum kita miliki saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan berisiko mengalami

penurunan pada tahun mendatang (Setiawan, 2019). Tidak mengherankan bila muncul pertanyaan di masyarakat, apakah ini sekadar untuk memaksakan adanya ‘legacy’ pada masa pemerintahan Jokowi, sementara konsekuensi ke depan adalah pekerjaan rumah besar untuk generasi berikutnya; mulai dari risiko utang dan pembiayaan, risiko bangkrutnya daya dukung lingkungan dan konflik sosial. Dari gap problematika analisis inilah penulis ingin melihat bagaimana framing wacana ekologis yang dilakukan pemerintah untuk membangun IKN? dan Apakah justru Pembangunan IKN menimbulkan masalah ekologis? Lantas Bagaimana NGOs melihat Pembangunan IKN? Serta Bagaimana Apakah Pembangunan Berkelanjutan yang ekologis bisa tercapai?

METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas tentang Wacana Politik Ibu Kota Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis. maka untuk mendalami topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Tinjauan Literatur, yaitu mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh karya sastra yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis pada topik tertentu. Studi Pustaka (Literature Study). (Perhatikan data analisis 1.1).

Tabel 1 Data Analisis Penelitian

Berita	
Kompas	https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?%27
BSILHK	https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/
Mongbay	https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-indonesia-eyes-relocating-its-capital-city-to-borneo/ https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/
Nasional Kompas	https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all

Money Kompas	https://money.kompas.com/read/2019/09/10/151200326/bank-dunia-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-bawah-5-persen-pada-2020 https://money.kompas.com/read/2019/09/26/120958226/sri-mulyani-akui-pemindahan-ibu-kota-tetap-bebani-apbn
Nasional Sindonews	https://nasional.sindonews.com/berita/1443484/15/pemindahan-ibu-kota-tni-butuh-anggaran-rp118-triliun

Laporan

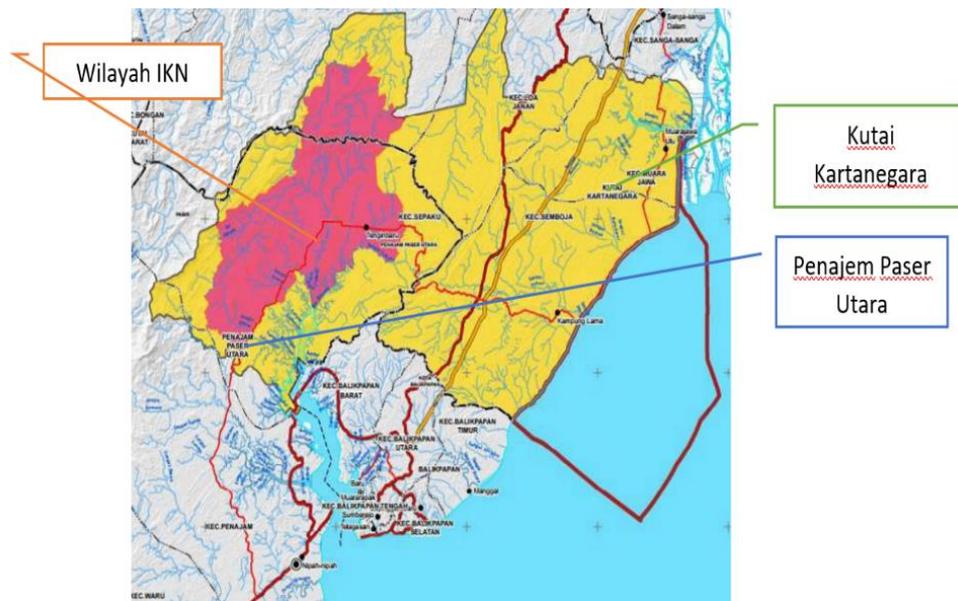
**Walhi Report “Titik Api di Kaltim”
Pokja, Walhi, Jatam Report “FINAL REPORT IKN”**

Sumber: Dikelola Penulis, (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Ihsanuddin, 2019). Jika sesuai dengan luas yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), luas keseluruhan wilayah IKN mencapai 180.965 ribu hektar (Haryanti, 2019), maka terdapat 4 (empat) kecamatan yang tercakup yakni Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten PPU. Sedangkan Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara sederhana dapat dikategorikan melalui tiga ring cakupan wilayah. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 180.965 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Terdapat 26 (dua puluh enam) desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 (dua puluh tiga) desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 8 (delapan) desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa serta 15 (lima belas) desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk 10 di masing-masing kecamatan sebagai berikut: Sepaku sebanyak 31.814 jiwa (2018), Samboja sebanyak 63.128 jiwa (2017) dan kecamatan Muara Jawa 37.857 jiwa (2017) dan Loa Kulu sebanyak 52.736 jiwa (2017) (Kompasiana, 2022).

Peta 1 Wilayah Pembangunan IKN



Sumber: Dikelola Penulis, (2022).

Pembangunan Berkelanjutan Ekologis Di IKN: Perspektif Wacana Politik

Pelaksana Tugas (Plt) Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo menyampaikan salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek. Maka dari itu presiden mengamanatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) untuk menciptakan IKN sebagai kota hijau yang berstandar ekologis. Menurut BSILHK dalam pembangunan berkelanjutan yang ekologis, pihaknya telah menghimpun standar instrumen yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan empat tahap yaitu: 1) Pra Kontruksi, 2) Kontruksi, 3) Pasca Konstruksi-operasi, dan 4) Pemantauan. Merespon hal itupun KLHK juga melakukan pembagian zonasi IKN Nusantara, nantinya wilayah IKN Nusantara akan memiliki 75% area hijau yang terdiri dari 65% area yang dilindungi dan 10% area untuk produksi pangan. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 75% area terbuka hijau, Kepala Badan mengatakan bahwa Unsur-unsur penting kota berkelanjutan harus mencakup pengelolaan sumberdaya secara tepat guna, pemanfaatan sumberdaya air dan energi harus efisien, adanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis dengan konsep forest city. “Hal ini untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal

75% kawasan hijau serta menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun dan sistem sosial yang ada secara harmonis.” Kata Kepala Badan (BSILHK, 2022).

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam dapat dilakukan melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Untuk mewujudkan itu, perlu dirancang standar instrumen di wilayah IKN Nusantara dan sekitarnya. Saat ini BSILHK telah menyusun 14 standar antara lain:

Tabel 1.3 Framing Pembangunan IKN yang Ekologis

1. Standar Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Satwa Alami (Eco-Bridge) Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Tinggi dari <i>cluster</i> Ekosistem di Koridor Satwa (Utara dan Selatan), Ekosistem di wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
2. Standar Restorasi Hutan Tropika Basah, dan Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Ekosistem di RTH Zona Rimba Kota (Transformasi HTI menjadi Hutan Tropika Basah Kalimantan) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan lainnya (Taman Kota, Taman Kecamatan dan Taman Kelurahan, jalur hijau, pemakaman).
3. Standar Penebangan untuk Ibu Kota Nusantara Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Kegiatan Industri, Pertambangan Migas (<i>OFF-SHORE</i>), Pemanfaatan Kayu di Areal Eks HTI IHM yang Telah Diadendum dan Kawasan Hutannya Telah di Lepas, dan Kegiatan Perijinan Berusaha (Pemanfaatan Hasil Hutan) <i>Existing</i> .
4. Standar Bibit Untuk Lansekap Perkotaan Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengelolaan Persemaian Modern Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Persemaian Skala Besar.
5. Standar Konservasi Tanah dan Air Untuk Pengendalian Potensi Banjir Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengelolaan Bahan Bakar Dalam Rangka Pengendalian Karhutla Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Dalam Rangka Pengendalian Karhutla, dan Standar Penilaian Desa Siaga Api Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Pencegahan dan Penanganan Bencana (Banjir, Swabakar Batubara, Gas Dangkal) dan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan).
6. Standar Kriteria Teknologi Pengelolaan Limpasan Air Hujan Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Bangunan Gedung perkantoran, perumahan, fasilitas Kesehatan, dan fasilitas Pendidikan.
7. Standar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Wilayah IKN Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari <i>cluster</i> Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu-TPST, Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> – TPS3R).

Sumber: (BSILHK, 2022).

Menteri LHK menjelaskan bahwa berdasarkan kawasan fungsi hutan, wilayah IKN terdiri dari hutan produksi terbatas 1 persen, hutan produksi yang dapat dikonversi 16 persen, hutan produksi biasa 17 persen, hutan konservasi 25 persen, dan areal penggunaan lain (APL) 41 persen. Berdasarkan peta tutupan lahan skala 1 : 5000 tahun 2019, KIKN yang masih berhutan seluas 42,31 persen (hutan lahan kering 38,95 persen, hutan mangrove 2,15 persen, dan hutan rawa gambut 1,21 persen), semak belukar dan tanah kosong 13,74 persen, perkebunan 29,18 persen, tanaman campuran dan tegalan/ladang 8,97 persen. Sisanya berupa sawah, padang rumput, pertambangan, dan sebagainya dengan luas rata-rata di bawah 1 persen.

KLHK telah melakukan proses alih fungsi lahan hutan produksi biasa menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 41.493 ha pada 2019. Kawasan hutan ini yang akan menjadi KIKN melalui proses pelepasan kawasan hutan menjadi APL dan akan dilakukan atas usul otorita IKN. Secara legal formal, KIKN sudah siap dan tidak menjadi masalah karena kawasan tersebut adalah bekas HTI yang tidak ada konflik tenurial. Tutupan hutannya pun secara ekologis masih sangat memadai, yakni 42,31 persen. Sebagai kota yang mengusung konsep kota hutan (forest city) dan berbasis lingkungan yang sesedikit mungkin atau tidak ada penebangan hutan, luas tutupan hutan 42,31 persen ini dirasa belum cukup dan harus ditingkatkan lagi menjadi 70–80 persen. KLHK telah mengantisipasi dengan penanaman pohon serta mempercepat program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di KIKN dan kawasan pengembangan IKN. Selain kegiatan RHL reguler seluas 1.500 ha setiap tahun, untuk mendukung pembangunan IKN dilakukan percepatan RHL pada 2023 dan 2024 masing-masing seluas 15.000 ha. Untuk itu, KLHK sedang membangun persemaian modern seluas 120 ha di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang mampu menyiapkan dan memproduksi 15.000.000 bibit berkualitas tinggi setiap tahun dan diharapkan tahun 2023 sudah dapat berproduksi. Untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di KIKN yang sebarannya meliputi Tahura Bukit Soeharto, kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Samboja, tutupan hutan dan kawasan buffer zone hutan lindung Sungai Wain, Teluk Balikpapan, Hutan Mangrove Kelurahan Mentawir, IUPHHK PT Inhutani II Batu Amapar-Mentawir, serta IUPHHK- HT PT ITCI Hutan Manunggal, maka KLHK telah menyiapkan koridor-koridor satwa. Desain koridor disiapkan berdasarkan tutupan hutannya, yakni hutan sekunder, semak belukar, hutan

tanaman, areal terbuka, serta jalan pengelolaan, termasuk jalan underpass dan flyover (BSILHK, 2022)

Penulis melihat bahwa Konsep *forescity* memiliki makna dengan konsep efisiensi ekologi ini mulai diterima seiring dengan pengembangan wacana dan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep ini juga diterjemahkan dalam berbagai level masyarakat, dalam artikelnya Li et al., (2010) bertajuk *A methodology for eco-efficiency evaluation of residential development at city level*. Namun disatu sisi perlu diingat bahwa wacana pembangunan berkelanjutan sering kali justru gagal diproduksi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Pembangunan berkelanjutan justru cenderung paradoks yang justru menciptakan nilai ekonomis yang meningkat dan kerusakan lingkungan yang juga terus meningkat. Justru alam dan seisinya semakin lama semakin berkurang daya dukungnya, sehingga eksploitasi lingkungan yang didasarkan pada kepentingan ekonomis semata, pada suatu ketika akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis. Kondisi seperti inilah yang menurut Borong (2019) disebut sebagai “krisis lingkungan”, yakni gejala akibat kesalahan atau kekurangan dalam pola dan cara pengelolaan sumber kebutuhan hidup manusia. Gejala-gejala tersebut dianggap sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air, terhadap bahan-bahan makanan, terhadap kelangsungan produktivitas kekayaan alam flora dan fauna, dan sebagainya. Dan apabila kekuatan ekologis ini telah sedemikian melemah, maka kesejahteraan yang dicapai manusia menjadi tidak bermakna. Sebab, kesejahteraan tadi harus dibayar dengan *recovery cost* untuk memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan – dan bahkan *social cost* yang sulit dihitung tingkat kerugiannya. Dengan kata lain, *trade off* yang ditimbulkan dari proses pembangunan sangat tidak seimbang dengan tingkat kemakmuran ekonomis yang diraihnya.

Pembangunan IKN Berkalanjutan Ekologis: Kritikan dan Segala Persoalannya

Walhi mengatakan hancurnya ekologi di Pulau Jawa disebabkan karena tidak ada tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Habisnya hutan di Pulau Jawa, kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. Tidak ada kaitan logis antara proteksi lingkungan dengan memindahkan kantor

pemerintahan ke pulau lainnya. Menyelamatkan ekologi Pulau Jawa harus dengan tindakan bukan ditinggalkan. Bila pemerintah tidak memiliki pemahaman ini, maka kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan diekspor ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah tertekan praktik industri kayu, sawit dan tambang. Konsep forest city berulang kali disebut. Namun, rencana ini belum dibagikan pada tim ahli dan pegiat lingkungan hingga belum jelas bagaimana pemerintah berencana membangun hunian perkotaan tersebut tanpa mengganggu ekosistem setempat (Gokkon, 2019). Yang sudah terjadi adalah proyek skala besar di Kalimantan, membuat hutan tempat hidup satwa terfragmentasi, termasuk menghilangkan koridorkoridor yang vital bagi satwa (Alamgir et al., 2019).

Widjo Kongko, Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan, tiga kecamatan di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, sepanjang 40 kilometer pantainya menghadap Selat Makassar dengan potensi Smong Megathrust Sulut dengan ancaman tsunami kecil-sedang. Hal lain, smong nontektonik yakni dari longsor juga perlu diperhitungkan. Sehingga kajian detail lindu-smong untuk pesisir Kalimantan Timur perlu dilakukan dari sumber Megathrust Sulut, Backarc Bali, dan sesar atau potensi longsor dasar laut curam Selat Makassar. “Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan,” kata Widjo Kongko. Kalimantan Timur juga tidak bebas dari gempa bumi dan tsunami. Pada tanggal 20 November 2009 terjadi gempa 4.7 skala richter dan gempa yang terbaru terjadi pula di Kabupaten Paser, kabupaten yang sama, dengan 4.1 skala richter, Gempa tersebut terjadi pada 20 Mei 2019, atau sebulan sebelum pengumuman pemindahan Ibu kota (Ramdhani, 2019).

Kabupaten Paser adalah kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota baru. Sementara itu, potensi dari tsunami yang disebabkan longsor bawah laut, ada tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes, yang berpotensi di wilayah Selat Makassar (Dewi, 2019). Namun, hingga kini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan telah membuat sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti semakin kering dan gersang hingga terancam berubah menjadi gurun pasir di satu sisi dan sisi lainnya langganan banjir. Bahkan saat ini,

ketika kita kembali menghadapi bencana kabut asap, lokasi calon ibu kota baru sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715. Per September 2019, ada 1.106 titik panas api (Walhi, 2019). Laporan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara [PPU], menyatakan beberapa daerah di PPU yang merupakan wilayah ibu kota negara baru, tak lepas dari kebakaran dan bencana asap. Titik lokasi di Nenang, Gunung Seteleng, dan Lawe-Lawe (Yovanda, 2019). Per-September 2019, terdapat 346 titik panas di Kalimantan Barat, 281 titik di Kalimantan Tengah, dan 105 titik di Kalimantan Selatan. Tidak saja mendapatkan asap berhembus dari provinsi lainnya, lokasi baru ini juga mengalami kebakaran. Artinya ibu kota negara baru berpotensi dalam kebakaran hutan (Christy, 2019). Selain itu juga Ibu Kota Negara juga tidak lepas dari pembangkit listrik dari energi kotor. Pembangkit listrik dari sumber energi kotor batu bara terus dibangun di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Pemerintah mengklaim meningkatkan komitmen pada Energi Terbarukan (EBT), tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan komitmen pada energi fosil. Dua pilihan energi ini bertentangan. Sulit bagi energi terbarukan yang adil untuk menjadi pilihan, bila pemerintah terus menerus memberikan ruang lebih banyak untuk energi kotor.

Menurut Walhi dan Jatam dalam laporan bahwa terbukti adanya keberpihakan pemerintah terhadap energi kotor batu bara salah satunya dengan terus bertambahnya jumlah penggunaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Setiap tahun jumlah DMO (Domestic Market Obligation) kian bertambah. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 berturut-turut adalah 76 juta ton, 86 juta ton, 91 juta ton, 97 juta ton dan 115 juta ton. Begitu juga dengan penggunaan energi kotor batu bara di Kalimantan. Terdapat 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Di Kalimantan, terdapat tujuh rencana pembangunan yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW. Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan listrik ibu kota baru di Kalimantan Timur, dibutuhkan pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt untuk kebutuhan 1,5 juta penduduk baru di ibu kota. Dengan target rampung 2024, maka pilihan tercepatnya adalah bersandar pada energi fosil, salah satunya energi kotor batu bara, penyebab masalah yang sama dengan polusi di ibu kota DKI Jakarta. Pemain besar batu bara melihat ini adalah sebuah peluang untuk

mendulang keuntungan. Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary BUMI, mengatakan Kalimantan Timur akan membutuhkan lebih banyak energi setelah ibu kota pindah dari Jakarta. “Kami dapat memasok batu bara ke pembangkit listrik atau bahkan membangun pembangkit listrik untuk mereka”.⁴⁸ Mega proyek Ibu Kota Negara juga akan menguntungkan perusahaan PT Bumi Resources, Tbk. (BUMI), melalui anak perusahaan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang berencana membangun pembangkit listrik baru, sejalan dengan pemindahan ibu kota baru RI ke Kalimantan Timur. PT. KPC memiliki tambang batu bara di daerah Sangatta, berjarak 170 kilometer (km) dari Samarinda atau sekitar 260 km dari wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.⁴⁹

Bukan hanya PT. KPC, perusahaan lain yang akan diuntungkan misalnya PLTU PT. Indo Ridlatama Power. Pembangkit berkapasitas 2x17,5 megawatt tersebut berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Salah satu pemilik sahamnya PT. Indonesia Power, anak perusahaan PLN Persero. Pendirian pembangkit tersebut juga punya banyak masalah. Salah satunya dugaan kuat korupsi pembebasan lahan, diindikasikan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,7 miliar. 50 Perusahaan tersebut juga melakukan suap dalam perizinan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang disebutkan dalam putusan majelis hakim dalam kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.⁵¹ Realitas 2: Ibu kota baru berisiko mengulang masalah polusi udara yang sama dengan Jakarta. Pemerintah tidak bisa mengisolasi kondisi lingkungan di dalam ibu kota baru, tanpa memperhatikan kebijakan energi dan lingkungan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia, karena isu lingkungan bersifat lintas batas. Polusi asap dan udara bersifat lintas batas. Ibu kota baru tetap akan terpapar polusi udara dari kebakaran hutan di Kalimantan dan polusi PLTU-PLTU batu bara yang sudah dan akan dibangun yang tersebar di Kalimantan (lihat Realitas 1 pada poin di atas). Diketahui bahwa emisi PLTU batu bara mengeluarkan polutan mono-nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO₂), dan lebih berbahaya lagi PM_{2,5}. PM 2.5 adalah partikel halus yang dapat menyebar di wilayah yang luas, terbawa angin hingga ratusan kilometer dari lokasi PLTU batu bara 52, ke area perkotaan, perumahan, masuk ke pembuluh darah manusia sehingga menyebabkan meningkatnya risiko kematian dini (premature death), berbagai penyakit pernapasan serius seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stroke, penyakit kardiovaskular, dan penyakit jantung.⁵³ Artinya, alasan perpindahan Ibu

Kota Negara ke Kalimantan Timur untuk menghindari polusi udara di Jakarta (yang sudah terkepung PLTU) 54 tak cukup. Faktanya, ibu kota baru juga akan terdampak polusi dari energi kotor PLTU batu bara, bahkan akan memicu pembangunan pembangkit batu bara baru (Walhi, Pokja & Jatam, 2022).

Dari penelusuran jatam dan walhi, berdasarkan laporan yang dikumpulkan melalui draft final ikn repot bahwa, kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN mulai dari Kawasan Inti Pemerintahan, Kawasan IKN hingga Kawasan Perluasan IKN bukanlah ruang kosong. Sebab sebelumnya sudah dipenuhi oleh izin-izin dan konsesi seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, PLTU dan konsesi bisnis lainnya. Terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batu bara di atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta. Itu belum termasuk 7 proyek properti di kota Balikpapan.

Hasil penelusuran menunjukkan ada 148 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 (satu) di antaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan nama PT. Singlurus Pratama seluas 24.760 hektar yang seluruh konsesinya masuk dalam cakupan IKN. Konsesi pertambangan saja sudah mencapai 203.720 hektar yang seluruhnya masuk dalam kawasan IKN. Terdapat pula 2 (dua) konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) 10 BPS Kutai Kartanegara. Dalam Angka PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluas 5.644 hektar seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU. Ditemukan pula 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 (delapan) berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Salah satu yang terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi-Amin. Perhatikan Lubang bekas tambang batu bara yang tak direklamasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, PPU, Kaltim (Walhi, Pokja & Jatam, 2022).

Gambar 1 Salah satu Lubang Tambang di Wilayah IKN



Sumber: (Walhi, Pokja & Jatam, 2022).

Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang) (Walhi, Pokja & Jatam, 2022). Melihat persoalan ini maka sesuai dengan hasil penelitian Pratama, Budiman & Sarmiasih, 2019) bahwa pemerintah selalu menciptakan sebuah wacana melalui actor oligarki baik pusat dan daerah dalam sebuah wacana kebijakan yang mampu membuat hubungan timbal balik antar aktor (pemerintah, swasta dan Civil society) saling menguntungkan sehingga upaya pembangunan yang berkelanjutan yang ekologis penulis menilai akan sulit untuk dilakukan. Ini jelas akan merugikan masyarakat adat yang terpinggirkan dan alam yang terus dirusak oleh pembangunan yang massif.

Diskusi Literature: Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Upaya Ekologis

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat didiskusikan bahwa semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia, maka kemampuan alam untuk menyediakannya semakin terbatas. Disisi lain, dalam rangka menyelenggarakan kebutuhannya, manusia melaksanakan usaha-usaha ekonomi dan industri yang mau tidak mau membawa akibat sampingan berupa pencemaran atau kontaminasi lingkungan. Dalam hal ini justru terjadi hubungan tegak lurus antara kebutuhan manusia dengan pencemaran, dimana semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia yang dipenuhi lewat usaha industri, maka tingkat pencemaran lingkungan dapat dipastikan semakin tinggi pula. Dan jika trend tersebut berlangsung terus-menerus, pada suatu saat akan terjadi suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi, sementara kemampuan dan kualitas lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali. Inilah yang disebut dengan *the limits to growth* yang diperkenalkan oleh (Meadows et al., 2018).

Dalam kaitannya dengan teori pembangunan, paradigma pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dianggap identik dengan paradigma pembangunan itu sendiri. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu dianggap sebagai indikator suksesnya pembangunan, dan sebaliknya pembangunan dapat dikatakan gagal jika tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi. Padahal jika diamati lebih lanjut, pada suatu titik kritis sering muncul suatu “anomali pembangunan”, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak identik dengan berkembangnya pembangunan. Hakikat dari anomali pembangunan ini adalah terjadinya *the limits to growth* seperti telah dijelaskan diatas. Terlebih lagi, paradigma pertumbuhan ini ternyata tidak dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, melainkan hanya terbatas pada beberapa pengusaha papan atas dan sebagian pejabat tinggi. Oleh karena itu, wajarlah jika paradigma ini justru menimbulkan masalah sosial yang sangat berat yakni kesenjangan sosial, yang pada gilirannya mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dan keresahan sosial. Dalam konteks pembangunan lingkungan ekologis misalnya, kelompok masyarakat yang menganut mekanisme pasar akan cenderung masif merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya memahami kota berkelanjutan menurut Kurnia Norvianti dalam penelitiannya mengatakan bahwa program kota berkelanjutan telah mendefinisikan kota berkelanjutan sebagai salah satu yang mampu mempertahankan pasokan sumber daya alam sementara kemajuan ekonomi, fisik, dan sosial tercapai, dan sisanya aman terhadap risiko lingkungan yang dapat merusak pembangunan (Hassan & Lee, 2014; Novianti, 2016). Dengan demikian, kota berkelanjutan menjadi konsep yang komprehensif namun sangat sulit terwujud, mengingat begitu kompleksnya unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dari beberapa definisi yang berhasil penulis eksplorasi, konsep ini memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam perdebatan akademis, muncul sebuah kritik dari Acemoglu (2012) tentang upaya mencapai keharmonisan tiga dimensi besar -ekonomi, sosial, dan lingkungan- dalam kota berkelanjutan. Ia menyebut bahwa dalam konteks pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, terdapat tiga posisi yang sangat menarik yaitu pertama, tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi tidak dapat digabungkan karena tujuan ekonomi selalu menargetkan pertumbuhan, dan tujuan ekologi selalu menargetkan batas; kedua, pilihan untuk memenuhi tujuan perlindungan lingkungan (perlindungan ekosfer), stabilitas ekonomi (pembangunan ekonomi terus stabil), dan keadilan sosial (peluang kelangsungan hidup yang sama) secara bersamaan dan dengan nilai yang sama memungkinkan untuk menjadikannya sebagai strategi tindakan yang berorientasi pada masa depan; dan ketiga, pendekatan keberlanjutan adalah strategi pengamanan dominasi modern. Selain itu ini dianggap merupakan bagian dari konsep hegemoni baru karena tidak memperhitungkan hubungan kekuasaan antar-subjek yang merupakan dasar dari kerusakan lingkungan dan munculnya kemiskinan. Dalam hal ini, keberlanjutan tidak banyak memberi perubahan dari konsep sebelumnya.

Memahami dimensi kota berkelanjutan adalah masalah yang kompleks. Hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks keberadaan kota-kota adalah latar belakang budaya dan perbedaan di tingkat nasional maupun regional. Jenks & Jones (2010) menganalisis bahwa ada perbedaan yang signifikan di berbagai belahan dunia tentang penafsiran kota yang berkelanjutan namun ada hal umum yang mendasari dan topik yang selalu muncul dalam perdebatan tentang kota berkelanjutan serta pengakuan tentang bentuk perkotaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan (Novianti, 2016). Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa tidak mungkin ada solusi spasial atau fisik yang bersifat tunggal, tetapi mungkin ada banyak

bentuk yang dapat muncul sebagai upaya mencapai keberlanjutan, tergantung pada konteks di mana mereka diterapkan.

Höjer, Gullberg, & Pettersson (2011) menyatakan bahwa ada risiko yang sangat nyata melekat dalam pertumbuhan perkotaan dan perluasan gaya hidup urban, yaitu bahwa dari penggunaan sumber daya yang terus meningkat dan beban lingkungan jauh melampaui apa yang dikelola oleh alam. Kebalikan yang diinginkan adalah sebuah kota ekologis yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini mereka mendefinisikan kota sebagai tempat dimana para penghuninya bisa hidup dengan baik dengan cara mempertahankan kelestarian dan mencegah kehancuran sumber daya kolektif serta meninggalkan sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang tanpa perubahan nyata yang lebih buruk. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan juga mengandaikan bahwa gaya hidup perkotaan tetap diterima secara sosial dan finansial yang memuaskan. Namun, penekanan utama dalam pemahaman mereka tentang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah pada pemanfaatan sumber daya rumah tangga dan bagaimana struktur perkotaan, lembaga, dan pola hidup dapat dimanfaatkan untuk berkolaborasi mengelola pemanfaatan sumber daya dalam batas yang dapat diterima.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN yang berkelanjutan dalam aspek ekologis akan sangat sulit dilakukan. Ini dikarenakan hampir wilayah IKN yang akan dibangun adalah lahan konsensi pertambangan batu bara. Banyaknya lubang tambang batu bara yang ada di wilayah administrasi IKN justru membuktikan bahwa pemerintah berupaya menutupi ruang kosong perusahaan yang tidak mampu melakukan reklamasi dan rehabilitasi eks tambang. Alih-alih menciptakan framing forest city, justru pembangunan yang dilakukan hanya untuk kepentingan semata. Selain itu pembangunan berkelanjutan yang menysasar ekonomi, sosial dan ekologis. Sampai saat ini seringkali tidak menemukan titik temu. Pembangunan yang mementingkan ekonomi akan membuat aspek sosial dimasyarakat mengalami peningkatan daya saing dan membuat gap antara si kaya dan miskin semakin jauh. Selain itu juga pembangunan yang hanya focus kepada ekonomi juga cenderung membuat lingkungan semakin krisis. Pembangunan yang menekankan pada aspek ekonomi dan social, maka kerusakan

lingkungan juga tak dapat dihindarkan, ini dikarenakan kebutuhan manusia yang meningkat yang membuat manusia harus memenuhi kebutuhannya secara brutal hingga membuat kerusakan sumber daya alam yang tidak dapat dihindarkan. Penulis menilai bahwa pembangunan IKN yang berkelanjutan dalam aspek ekologis cenderung sebagai sebuah agenda setting yang humanis untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Wacana ekologis yang dibuat cenderung utopis dan penuh syarat kepentingan politik anggaran dalam artian menggelontorkan anggaran yang besar menggunakan APBN negara demi memenuhi kebutuhan patron-politik (swasta dan pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Suhardiman, A., Supriatna, J., & Laurance, W. F. (2019). High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesian Borneo. *Scientific Reports*, 9(1), 1-10.

Acemoglu, D. (2012). Introduction to economic growth. *Journal of economic theory*, 147(2), 545-550.

Borrong, R. P. (2019). Kronik Ekoteologi: Berteologi Dalam Konteks Krisis Lingkungan. *Stulos*, 17(2), 185-212.

BSILHK. (2022). Membangun Standar Forest City Ibu Kota Nusantara. Diakses pada <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/>

Christy. (2019). Calon Ibu Kota Baru Potensi Tinggi Kebakaran Hutan. Diakses pada <https://data.tempo.co/data/522/calon-ibu-kota-baru-potensi-tinggi-kebakaran-hutan>

CnnIndonesia. (2019). Perencanaan Matang Jadi PR Suharso, Kepala Bappenas Baru. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191024110731-532-442470/perencanaan-matang-jadi-pr-suharso-kepala-bappenas-baru?>

Dewi, K. R. (2019). BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all>.

Gokkon, B. (2019). Red flags as Indonesia eyes relocating its capital city to Borneo. Diakses pada <https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-indonesia-eyes-relocating-its-capital-city-to-borneo/>

Haryanti, R. (2019). Luas Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Hampir 3 Kali DKI Jakarta. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota->

baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?%27.

Hassan, A. M., & Lee, H. (2015). The paradox of the sustainable city: definitions and examples. *Environment, development and sustainability*, 17(6), 1267-1285.

Höjer, M., Gullberg, A., & Pettersson, R. (2011). Backcasting images of the future city—Time and space for sustainable development in Stockholm. *Technological Forecasting and Social Change*, 78(5), 819-834.

Ihsanuddin. (2019). Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all>.

Jenks, M., & Jones, C. (2010). Issues and concepts. In *Dimensions of the sustainable city* (pp. 1-19). Springer, Dordrecht.

Kompasiana.com. (2022). Ancaman Masyarakat Adat? UU IKN Picu Kontroversi Publik. Diakses pada https://www.kompasiana.com/webe/61ee05654b660d71df74da93/butuh-dua-hari-dua-malam-uu-ikn-picu-kontroversi-publik?page=2&page_images=2

Laksono, Y.L. (2022). Taman Hutan Jadi Referensi Konsep Forest City IKN Nusantara. Diakses pada <https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/27/193618021/taman-hutan-ini-jadi-referensi-konsep-forest-city-ikn-nusantara?page=all>.

Li, D. Z., Hui, E. C., Leung, B. Y., Li, Q. M., & Xu, X. (2010). A methodology for eco-efficiency evaluation of residential development at city level. *Building and Environment*, 45(3), 566-573.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (2018). The limits to growth. In *Green planet blues* (pp. 25-29). Routledge.

Novianti, K. (2016). Kota Berkelanjutan: Antara Ide Dan Implementasi Dalam Perspektif Pemangku Kepentingan. Sustainable Cities Team of European Research Group, Regional Resources Research Center, Regional Resources Research Center, Indonesian Institute of Science (P2SDR-LIPI).

Pratama, P. Y., Budiman, B., & Sarmiasih, M. (2019). A comparative political analysis between the new order regime and the reformed era in Indonesia: A case study of oligarchy politics in the mining industry of East Kalimantan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(3), 194-207.

Ramdhani, J. (2019). BMKG Ungkap Catatan Sejarah dan Potensi Gempa-Tsunami di Kaltim. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4678277/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-dan-potensi-gempa-tsunami-di-kaltim>

Setiawan, D. R. S. (2019). Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5 Persen pada 2020. Di akses

pada <https://money.kompas.com/read/2019/09/10/151200326/bank-dunia-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-bawah-5-persen-pada-2020>.

Simanjutak, A. R. (2019). Pemindahan Ibu Kota Tni Butuh Anggaran RP 118 Triliun. Diakses Pada <https://nasional.sindonews.com/berita/1443484/15/pemindahan-ibu-kota-tni-butuh-anggaran-rp118-triliun>

Sukmana, Y. (20.19). Sri Mulyani Akui Pemindahan Ibu Kota Tetap Bebani APBN. Di akses pada <https://money.kompas.com/read/2019/09/26/120958226/sri-mulyani-akui-pemindahan-ibu-kota-tetap-bebani-apbn>

Walhi. (2019). Kalimantan Timur tentang “titik api di Kalimantan Timur”.

Walhi, Pokja & Jatam. (2022). “FINAL REPORT IKN”.

Yovanda. (2019). Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur, Nasib Ibu Kota Negara?. Diakses pada <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/>